BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan yang berkualitas memiliki peran serta fungsi yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang diperlukan oleh para *investor* dan *kreditur*. Informasi yang terdapat di laporan keuangan diharapkan dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik, kebenarannya lebih dapat dipercaya daripada dengan laporan keuangan yang belum atau tidak di audit.

Untuk memiliki laporan keuangan yang berkualitas harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit, auditor harus memiliki informasi yang dapat diverifikasi dan beberapa kriteria sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan digunakan oleh auditor yang tujuannya untuk mengevaluasi informasi tersebut. Laporan keuangan yang telah diaudit bagi para *investor*, *kreditur* serta publik meyakini jika laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP sudah tentu laporan tersebut bebas dari kesalahan baik yang disebabkan karena kekeliruan ataupun kecurangan. Profesional akuntan dipercaya untuk memberikan pandangan independen atas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disampaikan secara wajar tanpa pengecualian. Namun, pada kenyataannya masih adanya kegagalan auditor dan Kantor Akuntan Publik atas kesalahan penyajian laporan keuangan yang terjadi di beberapa perusahaan yang mengakibatkan penurunan kualitas audit.

Salah satunya terjadi pada Perusahaan Manufaktur di subsektor bahan makanan dan minuman yang mengalami salah saji laporan keuangan. Perusahaan makanan dan minuman (*food and beverage industry*) merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di bidang makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman berkembang sangat pesat di Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap

tahunnya. Dikarenakan perusahaan makanan dan minuman dibutuhkan oleh banyak masyarakat dalam kondisi apapun sehingga memiliki prospek yang menguntungkan baik di masa sekarang maupun masa depan.

Adanya fenomena yang terjadi disalah satu perusahaan manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang mengalami penurunan kualitas audit dikarenakan adanya manipulasi laporan keuangan PT Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2017. Dimana masalah ini masih dalam proses penyelidikan terkait over statement di laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2017 yang telah diaudit oleh KAP Amir abadi Jusuf, Aryanto, Mawar serta Rekan berafiliasi dengan “RSM Internasional” KAP yang mengaudit AISA di tahun 2017. Sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP Ernest dan Young, ditemukan bahwa adanya dugaan perkiraan terlalu tinggi pada debitor, stok dan aset tetap berasal dari kelompok AISA sebesar Rp 4 triliun, aset tetap grup AISA sebesar Rp 662 miliar dan pada penjualan sebesar Rp 329 miliar di EBITDA entitas food. Kemudian ditemukan adanya dugaan peredaran dana sebanyak Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi menggunakan manajemen lama, diantaranya dengan menggunakan pencairan pinjaman grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). KAP Amir abadi Jusuf, Aryanto dan Mawar & Rekan dianggap tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan auditor diperkirakan tidak mendeteksi kesalahan laporan keuangan di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) di tahun 2017. KAP telah melanggar hukum auditor saat melakukan tugas, tidak hanya dengan mengikuti program audit yang ditetapkan pada program audit, namun juga dengan mempertahankan independensinya menjadi auditor yang mengakibatkan hubungan kurang sehat yang terjadi antara auditor dengan klien atau KAP dengan klien (www.cnbcindonesia.com, 2019).

Sehingga untuk mencegah tidak terjadi hubungan yang tidak diinginkan antara auditor dengan perusahaan klien yang menyebabkan penurunan kualitas audit dan kepercayaan publik mengenai Kantor Akuntan Publik yang terkait.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan untuk pergantian kantor akuntan publik atau auditor yang dapat mencegah masalah audit yang terjadi di Indonesia.

Pergantian yang dimaksud untuk mencegah penurunan kualitas audit yaitu melakukan *Auditor Switching*. *Auditor Switching* yaitu pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang melakukan pekerjaan audit pada suatu industri untuk mematuhi peraturan pemerintah atau atas permintaan industri itu sendiri. Menurut Majid et al., (2021) perubahan auditor disebabkan oleh klien dan auditor. Faktor klien berasal dari kesulitan keuangan dan kegagalan manajemen untuk menjalankan tugasnya, faktor auditor muncul dari biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor yang diberikan auditor kepada klien. Pergantian auditor bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Mandatory* yaitu melakukan pergantian auditor oleh perusahaan karena adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengganti auditornya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan *voluntary* yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengganti auditornya dimana tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk mengganti auditor tersebut (Yanti dan Wijaya, 2020).

Menurut Yanti dan Wijaya (2020) *Auditor Switching* tidak memiliki pengaruh dikarenakan pada umumnya pelaku pasar tidak terlalu memperhatikan lebih jauh terkait pergantian akuntan publik ataupun auditor yang mengeluarkan opini di laporan keuangan, maka kualitas audit tidak ditentukan secara signifikan oleh kualitas audit. Tetapi hasil penelitian Majid et al., (2021) mengatakan bahwa *Auditor Switching* berpengaruh negatif dan signifikan yang artinya auditor akan mempelajari lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengenal perusahaan baru atau klien baru dan perlu mengetahui lebih banyak detail tentang perusahaan daripada jika mereka melanjutkan dengan klien lama. Dan hasil dari Sukirman dan Asih, (2021) menyatakan bahwa *Auditor Switching* berpengaruh positif dikarenakan untuk menghasilkan audit yang lebih andal, auditor harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak lain untuk meningkatkan kualitas audit.

Peraturan tentang pergantian kantor akuntan publik atau auditor merupakan suatu solusi yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang

terjadi terkait penurunan kualitas audit. Kebijakan ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan, pembatasan kinerja audit hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama lima tahun buku berturut-turut. Dan akuntan publik dapat memberikan jasa audit kembali setelah dua tahun buku berturut-turut, tidak memberikan jasa audit informasi keuangan historisnya. Dan pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru dari Menteri Keuangan untuk menyempurnakan peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Badan Pengawasan dan Pembinaan Akuntan Publik.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *Professional Fee* atau biasanya disebut *fee audit*, merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada auditor atau KAP dari perusahaan atau klien sebagai bayaran jasa setelah menyelesaikan jasa auditnya. Namun, dalam penelitian ini tidak dapat diprosikan menjadi fee audit dikarenakan belum bisa dipastikan apakah benar-benar menunjukkan proksi yang jelas terkait fee audit yang ada di dalam *professional fee* (Heristin, 2017).

Di dalam laporan keuangan besarnya *professional fee* terdiri dari berbagai pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap jasa tenaga ahli atau professional, seperti Jasa Akuntan Publik, Notaris dan berbagai Jasa Professional lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan pembayaran jasa audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah salah satu aspek yang termasuk didalam *Professional Fee* yang terdapat pada laporan keuangan. Akan tetapi, besaran *professional fee* juga dipengaruhi dari tingkat keahlian, risiko penugasan yang diterima dan tingkat kerumitan auditor dalam memberikan jasa auditnya yang akan disesuaikan dengan besaran anggaran biaya kepada KAP sebagai pemberi jasa (Kurniawati dan Satyawati, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Heristin (2017) dan Simanullang dan Utami (2021) menyatakan bahwa biaya audit dengan menggunakan proksi *professional fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil penelitian Suwarno et

al.,(2020) menjelaskan bahwa biaya audit dengan proksi *professional fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Untuk menghindari penurunan kualitas audit, Institusi Akuntan Publik Indonesia *fee audit* juga telah mengeluarkan peraturan tentang kebijakan *Professional Fee* atau yang dimana mengatur besaran *fee* yang harus dibayar oleh klien kepada KAP atas jasa profesional terkait dengan audit laporan keuangannya. Institusi Akuntan Publik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Republik Indonesia Nomor KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *Fee Audit*. Peraturan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh anggota IAPI yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesionalnya yang telah diberikan.

Dan faktor selain *Auditor Switching* dan *Professional Fee* juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *Company Size*. *Company Size* adalah ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang ditinjau dari sejumlah ketentuan diantaranya yaitu keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, log size dan lain sebagainya. Menurut Narsuci et al., (2020) *Company Size* artinya ukuran atau area usaha serta merupakan indikator yang memberikan kondisi serta karakteristik perusahaan tersebut. Perusahaan besar dianggap memiliki risiko yang lebih kecil daripada perusahaan kecil dikarenakan perusahaan besar memiliki akses ke lebih banyak pasar modal dan menjadi sasaran pengawasan publik yang lebih besar. Untuk memperoleh kualitas audit yang sangat baik, perusahaan besar juga memiliki manajemen yang berpengalaman dan profesional untuk menambah nilai perusahaan dengan mengelola dan menggunakan sumber daya aset perusahaan dengan cara yang memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian Narsuci et al., (2020) bahwa *Company Size* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit ini berarti tidak adanya perbedaan antara perusahaan besar maupun kecil karena perusahaan juga akan menginginkan kualitas audit yang baik dan akan terus meningkatkan kualitas audit pada laporan keuangannya. Sedangkan hasil penelitian Nelvia (2020) menunjukkan hasil bahwa

Company Size berpengaruh karena perusahaan yang memiliki total aset yang tinggi dan manajemen yang baik dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian intern akan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut, dimana kualitas audit menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan dikarenakan untuk mengidentifikasi suatu masalah, risiko, kekurangan pada sistem yang dapat merugikan dan mencegah adanya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut. Maka menurut Jusuf (2017: 50) Kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti pada setiap audit, Kantor Akuntan Publik mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten di setiap penugasannya. Berdasarkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) kualitas audit yaitu suatu indikator kunci yang memungkinkan audit yang berkualitas dilaksanakan oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan standar profesi serta ketentuan aturan yang berlaku.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit, alasan lainnya yaitu karena hasil peneliti sebelumnya memberikan hasil yang berbeda dengan kata lain penelitian ini masih terdapat inkonsistensi hasil penelitiannya (*gap research*). Dan penelitian *Auditor Switching, Professional Fee, Company Size* masih jarang untuk diteliti maka tujuan penelitian ini untuk menguji dan memberikan bukti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “ ***Pengaruh Auditor Switching, Professional Fee, Company Size Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Subsektor Bahan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Apakah *Auditor Switching* berpengaruh terhadap Kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?
- 2) Apakah *Professional Fee* berpengaruh terhadap Kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?
- 3) Apakah *Company Size* berpengaruh terhadap Kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang merupakan tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *Auditor Switching* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *Professional Fee* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *Company Size* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur subsektor bahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Kepentingan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan audit serta sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas audit.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas peraturan yang ditetapkan oleh IAPI terkait mengenai fee yang dibayarkan kepada auditor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak pemerintah untuk mengawasi peraturan yang ada serta mengawasi kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan kualitas audit agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai calon investor untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat kualitas audit perusahaan.